



Gubernur Lemhannas RI dan Jajarannya Hadiri RDP dengan Komisi I DPR RI (hal. 4)

- Lemhannas RI Gelar Pelantikan 15 Pejabat
- Warga Lemhannas Harus Bijak Hadapi Suhu Politik 2018
- Gubernur Lemhannas RI dan Jajarannya Hadiri RDP dengan Komisi I DPR RI
- Mahasiswa IKIP Veteran Semarang Perdalam Wawasan Kebangsaan di Lemhannas RI
- Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Lemhannas TA 2017
- Panitia Perayaan Natal Lemhannas RI Lakukan Bakti Sosial
- Maknai Momentum Perayaan Natal 2017 dengan Berbagi Kasih
- Agus Widjojo Lakukan Lawatan ke Amerika Serikat
- UNS Kirim 100 orang Tenaga Pendidik Ikuti Taplai
- Pegawai Lemhannas Ikuti Workshop Pengembangan Fitur KRISNA
- Menristekdikti Ajak Dosen UNS Rekonstruksi Kurikulum
- Lemhannas Bertekad Pertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian



Lemhannas RI Gelar Pelantikan 15 Pejabat

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo melantik eselon I, II, dan III sekaligus melepas sejumlah pejabat di Ruang Nusantara, Gedung Trigatra Lemhannas RI, Selasa (16/1) pagi. Upacara pelantikan dan pengangkatan sumpah janji ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Marsdya TNI Bagus Puruhito, Sekretaris Utama Komjen Pol Drs. Arif Wachyunadi, Sekjen IKAL, Tenaga Pengajar, Tenaga Pengkaji, Tenaga Profesional, beserta Pejabat Struktural Lemhannas RI dan Pengurus Perista.

Dalam sambutannya, Agus Widjojo berpesan kepada pejabat yang baru saja dilantik untuk selalu menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang diemban. "Jadikan tugas sebagai amanah, tanggung jawab dan kehormatan yang harus dijunjung setinggi – tingginya," ujar Agus Widjojo.

Menurutnya, sebagai lembaga think tank presiden, Lemhannas RI membutuhkan orang-orang dengan kualifikasi terbaik untuk membawa Lemhannas RI menjadi organisasi yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan. "Saya yakin dengan bekal pengalaman, kemampuan yang dimiliki, saudara mampu berperan aktif dan menjadi teladan yang baik dalam menerapkan standar tinggi saat bekerja.

Mampu menggerakkan seluruh komponen perangkat organisasi serta cakap menerjemahkan kebijakan pimpinan ke dalam program kerja dengan strategi pencapaian terukur," kata Agus Widjojo.

Memasuki tahun 2018 yang dipandang sebagai tahun politik, Agus Widjojo berpesan kepada para peserta pelantikan agar menjaga Lemhannas RI untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan terus bersikap netral sebagai aparatur negara. Tak hanya itu, Agus Widjojo juga mengingatkan kepada para pejabat untuk tak lupa menjadikan Lemhannas RI sebagai lembaga pemerintah yang mampu mewujudkan penyelenggaraan tugasnya secara transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kepentingan nasional.

Dalam pelantikan ini, sebanyak 12 orang pejabat dilepas dari jabatannya oleh Gubernur Lemhannas RI, dan 15 orang dilantik serta diambil sumpah janjinya. Salah satu pejabat yang diambil sumpah janjinya adalah Kolonel Arh. Ramses Lumban Tobing, S.E yang dilantik sebagai Direktur Pengkajian Ekonomi Debidjianstrat Lemhannas RI. Diakhir sambutannya, Gubernur mengapresiasi ke-12 orang pejabat yang telah mengabdikan kepada Lemhannas, serta mengucapkan selamat melanjutkan tugas di tempat yang baru. ●



Warga Lemhannas Harus Bijak Hadapi Suhu Politik 2018

Upacara Bendera yang rutin dilaksanakan setiap bulan menjadi salah satu wadah komunikasi bagi pimpinan dengan seluruh warga Lemhannas RI," ucap Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo diawal Amanatnya pada Upacara Bendera Rutin yang diikuti oleh seluruh anggota Lemhannas RI di Lapangan Tengah Lemhannas RI, Rabu (17/1). Agus Widjojo menuturkan bahwa momentum ini juga menjadi kesempatan untuk bertukar informasi yang berkaitan dengan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan juga terkait dengan dinamika kelembagaan.

Berkaitan dengan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Agus Widjojo menyampaikan bahwa Pilkada kemungkinan akan berlangsung secara serentak di 171 daerah di Indonesia tahun 2018 ini. Menyikapi suhu politik yang akan meningkat nantinya, Agus Widjojo mengingatkan

kepada seluruh warga Lemhannas RI, "Warga Lemhannas diharapkan dapat bersikap bijak dan cerdas terhadap meningkatnya suhu politik di tahun 2018 maupun adanya upaya pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang ingin memecah belah bangsa Indonesia."

Selain itu, Agus Widjojo juga menyampaikan hal-hal terkait kelembagaan seperti capaian anggaran Lemhannas RI pada Tahun Anggaran 2017 yang mencapai 96,71 persen. Walaupun serapan tersebut mengalami penurunan dibandingkan Tahun Anggaran 2016, Agus Widjojo tetap mengapresiasi upaya maksimal seluruh anggota Lemhannas RI.

Agus Widjojo juga terus mendorong seluruh unit kerja di Lemhannas RI untuk mengoptimalkan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian hingga pengawasan di setiap unit kerja secara cermat. Sinergi dan soliditas antar unit kerja,

Lemhannas diharapkan dapat bersikap bijak dan cerdas terhadap meningkatnya suhu politik di tahun 2018 serta adanya pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang ingin memecah belah bangsa Indonesia

jelas Agus Widjojo, juga harus terus dijaga dan ditingkatkan.

Terkait dengan Jakarta Geopolitical Forum 2018 yang ke-2 yang direncanakan akan diselenggarakan pada bulan September mendatang, Agus Widjojo meminta tim kepanitiaan untuk terus mematangkan persiapan agar Jakarta Geopolitical Forum 2018 dapat berjalan lebih baik dari Jakarta Geopolitical Forum 2017.

Sebelum menutup amanatnya, Agus Widjojo menekankan mengenai pemeriksaan BPK RI. Seluruh unit kerja, lanjut Agus Widjojo, diharapkan mampu mendukung kelancaran pemeriksaan pengelolaan keuangan negara Tahun Anggaran 2017. "Persiapkan seluruh data dukung pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja dan Tahun Anggaran 2017 yang telah kita laksanakan. Sajikan secara terbuka dan transparan," pungkas Agus Widjojo. ●

“Gubernur Lemhannas RI dan Jajarannya Hadiri RDP dengan Komisi I DPR RI”

Komisi I DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Lemhannas RI untuk membahas beberapa agenda yakni rencana program kerja tahun anggaran 2018, evaluasi program kerja dan realisasi anggaran tahun anggaran 2017, serta kajian terhadap isu-isu aktual terkait pelaksanaan persiapan pilkada 2018, di Komplek Parlemen, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (17/1).

Para anggota Komisi I menyoroti agenda pembahasan kajian-kajian yang dilakukan oleh Lemhannas RI terhadap isu aktual terkait penyelenggaraan pesta demokrasi serentak 2018 mendatang. Dalam RDP tersebut, beberapa fraksi berpendapat bahwa Lemhannas RI sebagai lembaga yang memiliki fungsi kajian strategis harus lebih mampu mensosialisasikan hasil-hasil kajiannya kepada masyarakat dengan memanfaatkan peran media sosial. “Jadi hasil pemikiran yang bagus harus masuk di ranah publik. Kajian Lemhannas yang akurat seharusnya bisa menjadi kebijakan yang bermanfaat bagi bangsa,” kata Andreas Hugo Pareira, salah satu anggota Komisi I dari fraksi PDIP.

Menanggapi usulan tersebut, Agus Widjojo mengatakan bahwa Lemhannas RI merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang tidak memiliki kewenangan operasional dalam hal mempublikasikan hasil kajiannya kepada khalayak. Hasil kajian tersebut digunakan sebagai masukan kebijakan kepada pemerintah. “Lemhannas tidak mempunyai kewenangan operasional, hasil kajian tidaklah diperuntukkan masyarakat, melainkan digunakan sebagai bahan kebijakan kepada presiden,” tambah Agus Widjojo.

Sedangkan Roy Suryo, anggota Komisi I dari fraksi Demokrat tertarik mengetahui lebih jauh satu kajian pada poin terakhir dari tujuh judul yang disampaikan oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo. “Menurut saya, poin satu sampai enam masih bersifat teori, sedangkan saya tertarik dengan poin ke tujuh yang bersifat teknis atau bisa disebut action,” jelas Roy Suryo.

Kajian dengan judul “Mengatasi *Proxy War* guna Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional dalam rangka Ketahanan Nasional”, telah

menjelaskan mengenai bentuk implementasi dari *proxy war* itu sendiri. “Bagaimana detailnya untuk mengatasi *proxy war* guna menjaga stabilitas keamanan nasional dalam rangka ketahanan nasional,” tanya Roy Suryo.

Menanggapi *proxy war*, Agus Widjojo menyampaikan bahwa *proxy war* adalah sebuah cara untuk mencapai sebuah kepentingan bagi sebuah pihak tanpa terlihat langsung. “*Proxy war* pada hakekatnya mencapai sebuah kepentingan bagi sebuah pihak tanpa terlibat langsung,” jelasnya.

Sementara hal lainnya terkait dengan kajian Lemhannas RI, Komisi berharap Lemhannas RI turut melibatkan DPR RI perihal hasil kajian terkait isu-isu strategis yang dilakukan oleh Lemhannas RI, misalnya dengan mengagendakan *Focus Group Discussion* (FGD) agar terjalin sinergi dengan pandangan pendapat Komisi I DPR RI. ●



Mahasiswa IKIP Veteran Semarang Perdalam Wawasan Kebangsaan di Lemhannas RI

“

NKRI berawal dari kawasan kebangsaan dan pemahaman akan ideologi Pancasila untuk mencapai cita-cita bangsa yang menjadi tameng dalam menghadapi ancaman-ancaman kebangsaan seperti fundamentalisme, radikal dan terorisme.



Kepala Bagian Humas Dr. Wahyu Widji P, S.Kom., M.M. didampingi oleh Kepala Bagian Protokoler dan Dokumentasi Letkol Laut (P) Eddy Tarjono menerima kunjungan mahasiswa IKIP Veteran Semarang dalam rangka Kuliah Kerja Lapangan ke Lemhannas RI, Rabu (18/1) di Ruang Syailendra, Gedung Astagatra.

Kedatangan kami ke Lemhannas RI bertujuan agar mahasiswa yang pada saatnya akan menjadi guru PPKn sebagai ujung tombak dalam pendidikan di masyarakat, dapat lebih memahami dan mengenal secara mendalam terhadap wawasan kebangsaan, ideologi negara, dan ideologi Pancasila,” ujar Srihadi.

Wahyu Widji yang turut pula mengapresiasi kedatangan para mahasiswa ke Lemhannas untuk belajar wawasan kebangsaan sebagai bekal ilmu dimasa mendatang berharap agar para mahasiswa dapat memanfaatkan

momentum ini dengan sebaik-baiknya dan dapat menyerap materi yang akan disampaikan oleh Tenaga Profesional Bidang Politik Dalam Negeri dan HAM Kisnu Haryo Kartiko, S.H., M.A.. Selanjutnya, para mahasiswa diperkenalkan mengenai Lemhannas RI melalui pemutaran video profil Lemhannas RI.

Diawal paparannya, Kisnu Haryo menjelaskan bahwa bekal wawasan kebangsaan sangat penting untuk dimiliki oleh setiap individu. “Wawasan kebangsaan harus dimiliki setiap orang karena sebelum mereka mengetahui halaman rumah Indonesia ketahui dahulu halaman rumah sendiri, yang artinya mereka harus mengenal lingkungan sekitar kita sendiri baru memperluas seluruhnya,” ujar Kisnu. Menurutnya, dengan memahami wawasan kebangsaan, seseorang mampu membangun karakter dan kesadaran terhadap jati diri dan sistem nasional dalam mengelola kehidupan bangsa dan negara.

Selain itu, Kisnu Haryo juga menjelaskan bahwa ideologi dapat digambarkan seperti organisme yang harus terus dikembangkan. Ideologi mempunyai tiga dimensi yaitu dimensi realita, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas. Hal tersebut juga serupa dengan Pancasila yang juga memiliki nilai-nilai sebagai landasan negara Indonesia. Di akhir paparannya, Kisnu Haryo menyimpulkan bahwa kesadaran membangun NKRI berawal dari wawasan kebangsaan dan pemahaman akan ideologi Pancasila untuk mencapai cita-cita bangsa seperti yang tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat. Pemahaman terhadap kebangsaan dan Pancasila tersebut, jelas Kisnu Haryo, diharapkan mampu menjadi tameng dalam menghadapi ancaman-ancaman kebangsaan seperti fundamentalisme, radikal dan terorisme.●

Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Lemhannas RI TA 2017



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan Taklimat Awal terkait pemeriksaan keuangan tahun anggaran 2017 dihadapan seluruh jajaran Pimpinan Lemhannas RI di Ruang Rapat Nusantara II, Gedung Trigatra, Kamis (18/1) pagi. Pemeriksaan keuangan tersebut akan dilakukan selama tujuh puluh hari kerja oleh tim pemeriksa BPK RI yang diketuai oleh Dr. Heru Kreshna Reza. Taklimat Awal tersebut dihadiri oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo beserta Wakil Gubernur Marsdya TNI Bagus Puruhito.

Agus Widjojo dalam sambutannya berharap agar seluruh pimpinan unit kerja turut membantu dan menjalin kerja sama yang baik dengan tim pemeriksa BPK RI agar kegiatan pemeriksaan berjalan dengan lancar. "Guna menjamin kelancaran pemeriksaan, diharapkan seluruh

pimpinan unit kerja dilingkungan Lemhannas RI agar membantu dalam pelaksanaan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh tim BPK dan menjalin kerjasama yang baik dengan menyediakan dokumen dan informasi yang menjadi lingkup pemeriksaan tim pemeriksa BPK RI," kata Agus Widjojo.

Sejak mendapatkan penilaian pemeriksaan atas laporan keuangan di tahun anggaran 2014 oleh BPK RI dengan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Lemhannas RI terus meningkatkan kinerjanya sesuai dengan agenda reformasi birokrasi hingga membuahkan hasil dengan memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan tahun anggaran 2016. "Hal tersebut tidak terlepas dari koordinasi, konsultasi, dan bimbingan dari BPK RI", jelas Agus Widjojo.

Heru Kreshna dalam paparannya menyampaikan bahwa tujuan diadakannya pemeriksaan ini diantaranya untuk menyesuaikan laporan keuangan Lemhannas RI dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan informasi keuangan, kepatuhan serta efektifitas sistem pengendalian intern.

Heru Kreshna juga sempat menyinggung beberapa pesan Presiden Joko Widodo yang disampaikan pada saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2015, 2016, dan 2017 yaitu bahwa anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan, dan kementerian/lembaga diminta untuk terus meningkatkan kompetensi anggaran di masing-masing kementerian/lembaga agar alokasi dapat terlaksana dengan tepat sasaran. ●

Panitia Perayaan Natal Lemhannas RI Lakukan Bakti Sosial



Sebagai rangkaian dari Perayaan Natal 2017, Panitia Perayaan Natal Lemhannas RI mengadakan bakti sosial yang dilaksanakan di Yayasan Rumah Piatu Muslim yang bertempat di Kramat Raya, Jakarta Pusat pada Kamis (18/1) serta Panti Asuhan Vincentius Puteri di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat (18/1). Dalam Bakti Sosial tersebut, Panitia Perayaan Natal Lemhannas RI yang diwakili oleh Ketua Panitia Bakti Sosial dr. Corrie Mary Milka Inkiriwang, M.A.R.S. menyerahkan bingkisan berupa sembako dan uang tunai yang diterima langsung oleh Kepala Yayasan Rumah Piatu Muslim Ny. S.Z. Goenawan dan Kepala Panti Asuhan Vincentius Putri Ibu Natal.

Yayasan Rumah Piatu Muslim sudah berdiri sejak tahun 1931, dan hingga saat ini terdapat 58 orang anak usia SD hingga SMA tinggal di panti tersebut dan diasuh oleh 10 orang pengasuh. Sementara Panti Asuhan Vincentius Puteri yang telah berdiri sejak tahun 1855 saat ini di

huni oleh 118 anak dari usia SD sampai SMA dengan didampingi oleh 11 orang pengasuh dan 32 orang pegawai panti lainnya.

Kedatangan Panitia Perayaan Natal Lemhannas RI disambut dengan hangat oleh anak-anak di kedua panti asuhan. Dalam sambutannya, dr. Corrie Mary Milka Inkiriwang mengatakan bahwa pemberian bantuan kepada anak-anak panti asuhan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial, dan tali kasih tanpa memandang suku, ras, maupun agama.

"Dalam hidup berbangsa dan bernegara kita semua sama, tidak

membeda-bedakan suku, maupun agama, itulah yang membuat bangsa Indonesia ini unik, karena bisa saling menghargai satu dengan lainnya," ungkap dr. Corrie Mary Milka Inkiriwang. Ia pun berharap apa yang dilakukan oleh panitia bermanfaat bagi anak-anak di kedua panti asuhan tersebut. Sebelum mengakhiri bakti sosial di kedua panti asuhan, Panitia Perayaan Natal melakukan foto bersama dengan Pengurus serta anak-anak di kedua panti asuhan dan ditutup dengan ramah tamah. ●

Maknai Momentum Perayaan Natal 2017 dengan Berbagi Kasih

Puncak Perayaan Natal 2017 Lemhannas RI digelar di Auditorium Gajah Mada, Gd. Pancagatra, Lemhannas RI, Kamis (24/1) dengan mengangkat tema "Hendaklah Damai Sejahtera Kristus Memerintah dalam Hatimu". Acara perayaan natal tersebut dibuka dengan persembahan lagu yang dibawakan oleh Kapten Yosua yang sekaligus sebagai MC acara tersebut bersama dengan Briпка Dewi Sekar Wulan.

Acara kemudian dilanjutkan dengan laporan rangkaian kegiatan natal dari Ketua Panitia Perayaan Natal, Brigjen TNI Mindarto. Dalam sambutannya Mindarto menyampaikan bahwa sebelum puncak acara pada hari ini telah dilaksanakan kegiatan bakti sosial dengan memberikan sembako dan uang tunai di tiga panti asuhan, yakni Panti Asuhan Pondok Taruna, Rumah Panti Muslimin, dan Panti Asuhan Vincentius Putri serta pembagian kacamata serta handuk gratis. "Perayaan natal ini merupakan bagian dari kegiatan lembaga, terdapat beberapa rangkaian kegiatan, sebelumnya kami telah membagikan

kacamata serta handuk gratis kepada seluruh personel Lemhannas RI, dan mengantarkan sembako ke tiga panti asuhan," ujar Mindarto yang juga menjabat sebagai Kepala Biro Humas Settama Lemhannas RI.

Acara tersebut dimeriahkan oleh penampilan anak-anak Pondok Taruna Orphanage yang membawakan permainan angklung serta penampilan dari Paduan Suara Lemhannas RI, dan Paduan Suara TNI AL. Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Mayjen TNI Karsiyanto, S.E. yang mewakili Gubernur Lemhannas RI, dalam sambutannya menyampaikan salam hormat dan salam bahagia kepada umat kristiani Lemhannas RI yang merayakan Natal Tahun 2017. "Perayaan natal hendaknya menjadi momentum indah bagi kita untuk menyadari kembali tugas perutusan serta komitmen kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," ujar Karsiyanto.

Mengakhiri sambutannya, Karsiyanto menyampaikan bahwa perlunya memahami kebhinnekaan yang dimiliki bangsa Indonesia, sebagai sebuah kekayaan dan

anugerah Tuhan yang Maha Besar. "Nenek moyang bangsa Indonesia telah mewariskan dari generasi ke generasi. Nilai-nilai toleransi, solidaritas, dan kesetaraan juga harus ditingkatkan dan dijadikan dasar etik tatanan kehidupan bermasyarakat, maka isu-isu yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa tidak akan tumbuh dan berkembang di masyarakat," tambah Karsiyanto.

Pesan Natal disampaikan pula oleh Pastor Romo Hibertus Hartono MSF, serta Doa Syafaat oleh Pendeta Sapta Siagian Mth. ●





Agus Widjojo Lakukan Lawatan ke Amerika Serikat

“
Perbedaan yang terdapat di Indonesia tidak mudah untuk dipersatukan namun pendiri negara mampu mengakomodir perbedaan yang ada melalui konstitusi/UU yang menjadi komitmen/konsensus bersama.”

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo melakukan kunjungan ke Amerika Serikat, Rabu (24/1) dalam rangka menghadiri beberapa agenda pertemuan di Negeri Paman Sam tersebut selama 8 hari.

Dalam lawatannya kali ini, Agus Widjojo mengikuti beberapa agenda diantaranya menghadiri forum diskusi di Westminster Institute yang membahas mengenai demokrasi dan pluralisme di Indonesia, kemudian mengikuti roundtable discussion yang diselenggarakan oleh CNAS (Center for a New American Security), melakukan presentasi terkait ancaman keamanan wilayah maritim Indonesia di *RAND Corporation* (Center for Asia Pacific Policy), menyempatkan berkunjung ke *National Defense University* selama dua hari, serta memberikan paparannya terkait Reformasi TNI dalam konteks Transisi Demokrasi di Indonesia di USINDO.

Pada saat menjadi pembicara pada pertemuan dengan 30 orang peserta diskusi di Westminster Institute, Agus Widjojo memaparkan tentang sistem pemerintahan demokrasi yang diterapkan di Indonesia yang ditinjau dari keberagaman masyarakatnya. Menurut Agus Widjojo, perbedaan yang terdapat di Indonesia tidak mudah untuk disatukan namun pendiri negara mampu mengakomodir perbedaan yang ada melalui konstitusi/UU yang menjadi komitmen/konsensus bersama.

Disamping kunjungan kenegaraan, Agus Widjojo juga menyempatkan menghadiri jamuan makan malam dengan Presiden USINDO David Merrill yang dihadiri pula oleh Duta Besar Amerika Serikat di Indonesia Mr. Robert O. Blake Jr. pada Kamis (25/1).

Selain itu, Agus Widjojo juga dijadwalkan melakukan kunjungan ke kantor berita VoA untuk Indonesia pada Rabu (31/1) lalu, didampingi oleh staf Gubernur Lemhannas RI dalam kunjungan ke VoA tersebut, Agus Widjojo melakukan tur singkat keliling kantor VoA untuk Indonesia yang selanjutnya diadakan acara diskusi tanya jawab yang dihadiri oleh sekitar 20 orang awak media VoA Indonesia. ●



UNS Kirim 100 Orang Tenaga Pendidik Ikuti Taplai

Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta kembali mengirimkan tenaga pendidiknya untuk mengikuti Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (Taplai) dan pelatihan kepemimpinan di Lemhannas RI, yang berlangsung selama delapan hari, dari tanggal 22-29 Januari 2018 mendatang. Pembukaan Taplai UNS Angkatan II tersebut diselenggarakan di ruang NKRI, Gedung Pancagatra Lemhannas RI Senin (22/1) pagi dengan dibuka secara langsung oleh Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Drs. Arif Wachyunadi didampingi oleh Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Laksda TNI Dedy Yulianto.

Taplai tersebut diikuti oleh 100 orang peserta yang terdiri dari 73 orang peserta laki-laki dan 27 orang peserta wanita. Sebagai simbol telah

dibukanya kegiatan taplai selama delapan hari kedepan, dilakukan pengalungan tanda peserta kepada perwakilan peserta oleh Sekretaris Utama Lemhannas RI. Rektor UNS Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. yang turut hadir mengantarkan 100 orang tenaga pendidiknya untuk belajar wawasan kebangsaan di Lemhannas RI tersebut dalam sambutannya mengatakan bahwa tenaga pendidiknya kelak yang akan menjadi penentu arah UNS dimasa yang akan datang. Oleh sebab itu, para tenaga pendidik di UNS Sementara memerlukan wawasan kebangsaan yang lebih baik. "Kami ingin mendapat persepsi yang sama, dalam menyongsong visi UNS 2030 yaitu menjadi *world class university* tetapi tetap berbasis budaya luhur nasional terutama nilai-nilai kebangsaan," kata Ravik.

Dirinya menyadari bangsa ini sedang berada di tengah-tengah perkembangan arus globalisasi dan

teknologi yang harus dihadapi secara bijak dan sebaik-baiknya. "Saya sebagai pimpinan UNS berpendapat bahwa kedatangan kami ke Lemhannas akan menjadi 'jamu yang manjur' di dalam usaha kami memantapkan nilai-nilai kebangsaan, di mana kita sedang dilanda perkembangan teknologi yang sangat masif, dan penentu arah masa depan UNS berada di tangan bapak dan ibu semua," ujar Ravik dihadapan para peserta taplai UNS angkatan II.

Sementara Komjen Pol Drs. Arif Wachyunadi dalam sambutannya mewakili gubernur Lemhannas RI menyampaikan kepada peserta agar dapat memanfaatkan kesempatan ini sebagai momentum perenungan dan introspeksi diri, terhadap wawasan kebangsaan mengingat tenaga pendidik memiliki peran penting dalam memajukan para generasi penerus bangsa. ●



Pegawai Lemhannas Ikuti Workshop Pengembangan Fitur KRISNA

Guna menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) tahun anggaran 2019, Lemhannas RI mengadakan workshop khusus membahas penyusunan RKA-K/L T.A 2019 serta pengembangan fitur dan pemanfaatan sistem informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) bagi pimpinan unit kerja di lingkungan Lemhannas RI.

Workshop tersebut menghadirkan dua orang pemapar yakni Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan Bappenas RI Ir. Basah Hernowo, M.A. dan Perencana Muda/ Plt. Kasubdit Sistem dan Prosedur Pendanaan Pemerintah Daerah Bappenas RI Agus Riyanto Kurniawan, S.E., M. Dev. Econ (Adv), Selasa (23/1) di ruang Krisna Gd. Astagatra Lemhannas RI.

Dalam paparan yang disampaikan, Basah Hernowo menyebutkan bahwa dalam penyusunan RKA-K/L tahun 2019, diharapkan adanya kemudahan bagi tiga pihak, yaitu Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Bahkan, Menpan RB akan melibatkan diri dalam menyusun Rencana Kerja di tahun 2019. Pemerintah juga telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 yakni dengan menitikberatkan pada pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan yang berkualitas.

Selain itu, terdapat lima prioritas nasional yakni pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif, pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air, serta stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Adapun, pengembangan fitur dan pemanfaatan sistem informasi KRISNA adalah sebagai basis data dan informasi untuk perencanaan Kementerian atau Lembaga. Selain itu fitur ini juga menjadi media monitoring & evaluasi, sebagai alat kontrol dan koordinasi dalam penyusunan rencana kerja dan indikator kinerja, sebagai alat bantu untuk melihat kerangka logis (keterkaitan) antara sasaran dan strategis dengan output yang dihasilkan, juga sebagai alat untuk melakukan analisis (menu laporan/*pivot table*). ●

*“
sistem informasi KRISNA
adalah sebagai basis
data dan informasi untuk
perencanaan Kementerian
dan Lembaga.”*



Menristekdikti

Ajak Dosen UNS Rekonstruksi Kurikulum

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir memberikan paparan dihadapan para peserta program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (Taplai) tenaga pendidik Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta terkait Kebijakan Nasional Pendidikan Tinggi Indonesia dalam menghadapi Revolusi Industri keempat, di Ruang NKRI Gd. Pancagatra Lemhannas RI, Sabtu (27/1).

Sebelumnya, Kemenristekdikti telah melakukan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan menghasilkan tujuh rekomendasi skala prioritas dalam menghadapi era revolusi industri keempat. Tujuh rekomendasi tersebut diantaranya bidang pembelajaran dan kemahasiswaan, kelembagaan, sumber daya, penguatan riset dan pengembangan, penguatan inovasi, reformasi birokrasi, serta zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, Mohamad Nasir juga mengatakan bahwa Pemimpin Perguruan Tinggi wajib mendukung inovasi untuk menghadapi perubahan global dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan kompetitif. Hal tersebut dikarenakan di abad 21 pada era digital, sistem serta pendidikan tinggi perlu disesuaikan agar relevan dengan revolusi industri keempat, antara lain dengan melakukan rekonstruksi kurikulum, dengan memberikan mahasiswa keterampilan atau kompetensi yang lebih luas, serta



menggunakan format baru dalam proses pembelajaran (dalam bentuk *face to face*, *blended learning*, maupun *full online learning*).

Tantangan ke depan yang akan dihadapi oleh perguruan tinggi memasuki era revolusi industri keempat, lanjut Mohamad Nasir, adalah biaya kuliah yang semakin mahal, terbatasnya jumlah dosen, sedangkan jumlah mahasiswa semakin bertambah. Dalam paparannya kepada peserta Taplai UNS angkatan II, Mohamad Nasir juga menyampaikan solusi yang bisa diambil dalam menghadapi tantangan tersebut yakni dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan produktivitas (efektif dan efisien) dengan tetap mempertahankan mutu serta perlu adanya harmonisasi atau pengembangan peraturan yang sudah ada. ●

Lemhannas Bertekad Pertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian

Selepas apel rutin, Senin (22/1) pagi seluruh pegawai Lemhannas RI mengikuti paparan tentang Rencana Kerja (renja) Lemhannas RI TA. 2019 dan pengelolaan anggaran TA. 2018 oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Anggaran Biro Perencanaan Keuangan Kolonel Laut (S) Trismawan Djonisajoko, S.E., M.M. yang mewakili Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan di Auditorium Gajah Mada Gd. Pancagatra.

Paparan tersebut bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait pagu anggaran Lemhannas RI yang nantinya akan digunakan untuk biaya operasional dalam melaksanakan rencana kerja anggaran tahun 2018. Pada kesempatan itu, Trismawan mengatakan bahwa BPK akan melakukan pemeriksaan laporan keuangan dari tiap kementerian/lembaga. Trismawan melanjutkan, "Lemhannas harus mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan meningkatkan kinerja."

Alokasi anggaran yang diterima Lemhannas RI tahun 2018 adalah

Rp277.698.000.000 dengan rencana pencapaian kinerja anggaran atau target realisasi sebesar 99 persen, dan pencapaian output 100 persen. Sedangkan, rencana pencapaian kinerja anggaran tahun 2019 tetap dinyatakan 99 persen dengan usulan rencana kerja yang diambil dari unit kerja.

"Tentunya, rencana ini akan terwujud apabila peran serta kita dengan selalu memberikan data dan informasi, serta rencana dan program anggaran yang dapat kita komunikasikan dengan memangku perencanaan, juga yang penting adalah ada komunikasi atau terinformasikan Lemhannas kepada pimpinan tertinggi di negara, yaitu Bapak Presiden." ujar Trismawan.

Menurut Trismawan, untuk mempermudah anggaran, tiap-tiap unit kerja harus memperhatikan apakah rencana kerja yang dibuat sudah sejalan dengan visi dan misi Presiden Jokowi ataupun belum. "Apabila mendapat dukungan dari presiden, sejalan dengan visi misi, skala prioritas, dan janji presiden, tentu akan mempermudah Lemhannas RI untuk mendapatkan anggaran yang dibutuhkan, bahkan bisa mendapat

anggaran yang lebih besar," tambah Trismawan.

Adapun, semua kegiatan dan pekerjaan yang dilaksanakan harus dapat diukur, sebab suatu organisasi yang baik adalah organisasi yang dapat diukur kinerjanya, serta kejelasan prosesnya. "Tentu saja, kegiatan-kegiatan Lemhannas RI harus terukur, baik output maupun kualitasnya, baik waktu maupun kuantitasnya," kata Trismawan. ●





Tim **Redaksi** newsletter Lemhannas RI

Pengarah: **Arif Wachyunadi** Penanggung Jawab/Pimpinan Redaksi: **Mindarto**

Redaktur Pelaksana: **Wahyu Widji Pamungkas** Penyunting/Editor: **Bambang Iman Aryanto**

Staf Redaksi: **Ni Made Vira Saraswati, Endah Heliana, C. Hildamona Permatasari, Magista Dian Fitrilia**

Desain: **Andriansyah** Fotografer: **Suryadi, Suyono, Dwi Jayanto**

Sekretariat: **Linda Purnamasari, Gatot, Ayu Novitasari** Alamat Redaksi: **Biro Humas Settama Lemhannas RI,**
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat, 10110 Telp. **(021) 3832108, 3832109** Fax. **(021) 3451926**

Website <http://www.lemhannas.go.id>